

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Setiap manusia lahir dengan karunia naluri, yaitu terbilang alamiah. Syah, Damayanti, dan Zahara (2023) menjelaskan tujuan dari pendidikan yaitu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan karakter pada siswa. Salah satu tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pendidikan adalah menggali potensi dan mencerdaskan manusia agar menjadi lebih baik.

Negara memiliki peran penting berkewajiban untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada setiap warganya, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa seluruh warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus, seperti anak-anak lainnya, mereka pun harus mendapat pendidikan yang layak. Semua orang adalah setara dan mempunyai hak juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikannya.

Pratiwi (2015) banyaknya orang tua dari anak ABK yang enggan memasukan anaknya ke lingkungan sekolah dengan alasan khawatir mendapatkan penolakan dan diskriminasi dari lingkungan sekolah. Salah satu bentuk program pendidikan yang dilakukan untuk mengatasi isu diskriminasi dan kesetaraan dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia yaitu dengan pendidikan inklusi. Hal ini didukung oleh Darma dan Rusyidi (2015) sekolah inklusi adalah upaya pemerataan dalam pendidikan dan implementasi sistem pendidikan yang adil tanpa membeda-bedakan, sehingga semua anak atau siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan secara khusus, mendapatkan kesempatan belajar yang setara.

Pendidikan inklusi adalah pendekatan inovatif yang memiliki tujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang cacat. Hal ini bukan hanya tentang memberikan akses, tetapi juga tentang perbaikan pendidikan yang mementingkan prinsip anti diskriminasi, kesetaraan hak, keadilan, peningkatan mutu pendidikan, dan perubahan persepsi masyarakat terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus (Zakia, 2015). Pernyataan ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional No 70 tahun 2009 pasal 3 disebutkan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusi pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nya (Rofiah & Kurniawan, 2017).

Pertumbuhan pendidikan inklusi terus berkembang di seluruh dunia, dan salah satu kesepakatan internasional yang mendukung implementasi sistem pendidikan inklusif adalah *convention on the rights of person with disabilities and optional protocol* yang disahkan pada maret 2007 (Firli, Widyastono & Sunardi, 2020). Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) hingga Desember 2022, di Indonesia sekitar 40.928 sekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta telah menerapkan pendidikan inklusi.

Sekolah inklusi tersebut, sekitar 135.946 peserta didik yang memerlukan perhatian khusus telah mengikuti proses pembelajaran di lingkungan inklusi tersebut. Melalui Pasal 4 ayat 1 Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota menunjuk paling sedikit satu Sekolah Dasar, dan satu Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan, dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang wajib menerima peserta didik ABK. Melalui peraturan ini, pemerintah menjamin hak penuh bagi ABK untuk memilih antara sekolah reguler atau sekolah khusus. Setiap sekolah yang dipilih harus menyediakan fasilitas dan dukungan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan ABK.

Program peningkatan jumlah sekolah inklusi menjadi program yang masif dilakukan di segala daerah di Indonesia, termasuk di kota Yogyakarta. Yogyakarta sebagai kota yang mempunyai *brand image* sebagai kota pelajar

salah satu faktornya banyaknya sarana dan prasarana pendidikan di Kota Yogyakarta termasuk jumlah sekolah inklusi di dalamnya. Penetapan sekolah inklusi di Kota Yogyakarta merupakan implementasi dari surat keputusan DIKPORA Kota Yogyakarta, Nomor 188/017 tahun 2023 tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (SPPI) Kota Yogyakarta tahun 2023. Jumlah sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yaitu 112 sekolah diantaranya *Home Schooling*; 1, Taman Kanak-Kanak (TK); 19, Sekolah Dasar (SD); 63, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 29.

Rofiah & Kurniawan (2017). Kota Yogyakarta berupaya untuk menjadikan kota yang inklusif dengan merintis empat kecamatan inklusi diantaranya Tegalrejo, Wirobrajan, Kotagede, dan Gondokusuman dengan tujuan agar keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus merasa diterima dan tidak perlu merasa malu atau menyembunyikan keadaan mereka. Berdasarkan data Dinas Sosial DIY, tercatat sekitar 1.819 individu dengan distabilitas. Saat ini, sekitar 63,24% anak berkebutuhan khusus di Yogyakarta telah mendapatkan pendidikan. Meski demikian, sekitar 37% anak masih belum memperoleh akses pendidikan yang layak (Rofiah dan Kurniawan, 2017).

Pendidikan inklusi ini sudah diterapkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar. Berdasarkan informasi dari Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPPI) tahun 2021, terdapat 17.134 Sekolah Dasar yang menerapkan sekolah inklusi yang berlokasi di 511 kabupaten atau kota

(Kemendikbud, 2021). Sekolah inklusi jenjang Sekolah Dasar juga telah di terapkan di Kota Yogyakarta dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan jenjang lainya yaitu berjumlah 63 sesuai dengan surat keputusan DIKPORA tahun 2023.

Sekolah Dasar memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan individu dan fondasi pendidikan yang kokoh. Sekolah Dasar merupakan langkah awal dalam perjalanan pendidikan seseorang. Di sini, anak-anak memperoleh pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, yang merupakan keterampilan yang sangat penting untuk membuka pintu menuju pengetahuan lebih lanjut di masa depan. Selain itu, Sekolah Dasar juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar berinteraksi sosial, bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Oleh sebab itu Sekolah Dasar menjadi sangat esensial untuk meningkatkan percaya diri dan mempersiapkan mereka terutama ABK untuk menghadapi tantangan akademik dan kehidupan di masa depan. Maka penting bagi setiap individu untuk mendapatkan akses dan mengikuti pendidikan Sekolah Dasar yang berkualitas.

Namun pelaksanaan pendidikan inklusi di tingkat Sekolah Dasar ini masih menghadapi berbagai macam tantangan. Beberapa masalah krusial yang muncul terkait dengan berbagai aspek-aspek penyelenggaraan sekolah inklusi. Ni'mah, Istrirohmah, dan Widiyono (dalam Sleman, 2018) pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Suka Ilmu di Kabupaten Kulon Progo

belum mencapai potensi maksimalnya, mengingat dari delapan aspek sekolah inklusi, masih ada beberapa yang belum berjalan dengan optimal. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Tarnoto (2016) kepada guru yang mengajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada jenjang Sekolah Dasar di wilayah Yogyakarta menyatakan bahwa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan inklusi berkaitan dengan beberapa kelompok seperti guru, siswa, orang tua siswa atau wali murid, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang juga menjadi hambatan dalam menjalankan pendidikan inklusi di lingkungan sekolah tersebut.

Penelitian lain dilakukan oleh Ru'iyah, Akhmad, Putwiyani, dan Sulistiawan (2021) seorang guru pendidikan agama islam di Kota Yogyakarta yang berlokasi di Sleman mendapatkan tugas mengajar di kelas inklusi yang belum pernah menerima pendidikan ataupun pelatihan khusus terkait menghadapi ABK. Akibatnya berimbas kepada minimnya pemahaman dan kemampuan karakter ABK tersebut. Hambatan pada sekolah inklusi juga dirasakan oleh guru di kelas 3A di sekolah Inklusi SDN Giwangan Yogyakarta yang telah dilakukan penelitian oleh Wahyuhastuti (2016) dimana selama proses pembelajaran, berbagai tantangan muncul seperti kegaduhan siswa, tuntutan bagi guru untuk mendampingi siswa ABK dengan lebih fokus, perasaan iri dari siswa biasa ketika guru lebih

banyak membantu siswa ABK, dan keharusan guru untuk menyusun tugas yang spesifik bagi siswa ABK.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan pada Februari 2024 pada guru pendamping di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta, tepatnya di SD Muhammadiyah Notoprajan. Ditemukan permasalahan seperti kurangnya kerjasama antara guru kelas dengan guru pendamping, sehingga ABK cenderung patut hanya ke guru pendamping nya saja. Selain itu juga, latar belakang pendidikan guru kelas yang berbeda, dan kurangnya edukasi atau pelatihan menjadi salah satu faktor sulitnya guru memahami ABK.

Banyaknya permasalahan yang terjadi pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta, hal ini tidak sesuai dengan mutu pendidikan inklusi dimana secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurikulum, dana, tenaga pendidik, manajemen lingkungan, dan proses pembelajaran (Zakia, 2015). Sedangkan faktor tenaga pendidik (Guru) memegang peranan yang signifikan dalam mencapai kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekolah yang mengadopsi sistem pendidikan inklusi membutuhkan dukungan dari tenaga pengajar dengan keahlian khusus untuk mengajar dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang terjadi bahwa pendidikan inklusi di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta masih menghadapi berbagai macam persoalan, faktanya dukungan yang diberikan seperti

fasilitas dan penyediaan guru khusus belum mencapai tingkat optimal. Tejena dkk (dalam Achyar, 2022) tidak semua guru dan kepala sekolah memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menjalankan pendidikan inklusi. Akibatnya, kebijakan di sekolah seringkali tidak tepat, dan pendekatan pembelajaran inklusi menjadi kurang produktif.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarnoto (2016) kepada guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di wilayah Kota Yogyakarta dimana dalam konteks masalah guru, banyak yang merasa kurang mampu dalam menghadapi ABK. Hal ini karena banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami ABK dan konsep sekolah inklusi, yang kemudian mengakibatkan tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Situasi ini semakin rumit dengan fakta bahwa beberapa guru mungkin tidak memiliki basis pendidikan yang relevan dan kekurangan guru pendamping kelas, sehingga meningkatkan tekanan tugas mereka, baik dari segi administrasi maupun mengajar (Tarnoto, 2016).

Hal ini secara tidak langsung memberikan Pengaruh terhadap cara guru dapat mengatasi siswa berkebutuhan khusus menjadi tidak optimal selain itu beban guru semakin berat ketika mereka menemukan fakta bahwa di lapangan banyak orang tua ABK tidak memberikan perhatian terhadap perkembangan anaknya. Tarnoto (2016) banyak orang tua yang sepenuhnya bergantung pasrah tentang perkembangan anaknya kepada sekolah, kondisi ini disebabkan karena pemahaman orang tua tentang ABK masih terbatas.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Chomza (2017) dalam penelitiannya yang berjudul kolaborasi guru reguler dengan guru pendamping khusus dalam layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi kelas 1 SD Taman Muda Yogyakarta bahwasanya orang tua dari anak berkebutuhan khusus tidak pernah hadir dalam rapat di sekolah dalam upaya *monitoring* dan evaluasi program.

Tarnoto (2016) salah satu tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari orang tua siswa reguler terhadap kebutuhan ABK. Banyak individu dalam masyarakat yang masih memiliki persepsi yang tidak positif terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan sistem sekolah inklusif, sehingga dukungan mereka untuk pendidikan inklusi menjadi terbatas. Keadaan ini bisa berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusi dan kebutuhan ABK. Akibatnya, beban kerja guru dan sekolah menjadi lebih berat. Secara keseluruhan, banyak sekolah yang belum sepenuhnya siap, baik dari aspek administrasi maupun sumber daya manusia, untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kurangnya dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, serta kurangnya fasilitas dari pemerintah untuk pendidikan inklusi, menghambat pelaksanaan sekolah inklusi berjalan dengan optimal.

Banyaknya tuntutan yang tinggi dari sekitar dan kurangnya dukungan yang memadai dapat menyebabkan guru merasa kelelahan secara fisik dan emosional, merasa tak berdaya, dan mengalami kejenuhan yang kemudian bisa berujung pada keputusan untuk pensiun lebih awal atau mengalami

burnout, seperti yang disebutkan oleh (Muttaqinah, Novitasari; Wardhani 2015). Hal tersebut berkaitan dengan kondisi kesejahteraan psikologis pada guru di sekolah inklusi tersebut. Kesejahteraan psikologis atau yang sering disebut *psychological well being* sangat berhubungan dengan kesehatan fisik, umur yang panjang, rasa kebahagiaan, dan lingkungan sosial yang mendukung, yang semuanya memberikan dampak positif bagi individu (Wibowo & wijono, 2021).

Ryff (1989) menjelaskan bahwa salah satu tanda kesejahteraan psikologis seseorang adalah kemampuannya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa individu dengan kesejahteraan psikologis yang baik umumnya memiliki kemampuan membangun relasi yang positif. Selain itu, karakteristik lain dari orang dengan tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi mencakup kemampuan menerima diri sendiri dan mandiri dalam pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan pribadi, dan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kenyamanan dirinya dan orang lain.

Dukungan sosial merupakan salah satu elemen yang memengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang (Ginting; Mufhidha, 2019). Sarafino dan Smith (2011) menjelaskan bahwasanya Dukungan sosial merupakan bentuk harga diri, kepedulian, maupun kerelaan memberikan pertolongan kepada orang lain dimana pertolongan tersebut juga diperoleh dari orang lain sehingga membuat individu tersebut merasa nyaman dengan lingkungan di sekitarnya. Menurut Ryff (1989) dukungan sosial merupakan

salah satu *item* yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Hal ini sejalan berdasarkan studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa FIP UNY (Riani, 2016).

Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi paling banyak mencapai 63 sekolah dan banyaknya permasalahan yang muncul terutama pada guru pendamping khusus dan semua guru yang berada di sekolah inklusi tersebut. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan sekolah inklusi ini menjadi tidak maksimal sedangkan faktor guru menjadi peran penting dalam mencapai kualitas pendidikan. Banyaknya tuntutan kerja dan kurangnya dukungan sosial pada guru menjadikan beban guru semakin berat, hal yang dapat meringankan beban pada guru yaitu salah satu faktornya dengan dukungan sosial yang mendukung sehingga guru merasakan kenyamanan dan kesejahteraan pada saat mengajar.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti apakah terdapat korelasi antara dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis para guru di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi tingkat Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan 6 dimensi pada variabel *psychological well being* pada guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang Sekolah Dasar Kota Yogyakarta.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berfokus pada variabel dukungan sosial dan *psychological well being* dengan harapan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan baru dalam ilmu psikologi, khususnya dalam psikologi pendidikan, psikologi sosial, dan psikologi positif.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Masyarakat mampu mendapatkan pengetahuan atau gambaran mengenai sekolah inklusi dan mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mental terutama pada *psychological well being* yang dimiliki ketika menjadi seorang guru di sekolah inklusi atau ketika memiliki anak yang berkebutuhan khusus.

b) Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi pendidikan terutama pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta, berkaitan dengan *psychological*

well being yang dimiliki gurunya, sehingga instansi pendidikan dapat lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan mental, memahami, dan dapat men sejahterakan gurunya dengan adanya dukungan sosial.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapan dari penelitian ini bisa membantu dan bermanfaat sebagai referensi yang dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna oleh peneliti selanjutnya, khususnya pada variabel yang digunakan pada penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
Issom dan Nadia	2021	Hubungan bersyukur dengan <i>Teacher Well-Being</i> pada Guru Mengajar Sekolah Inklusi.	Ke Penelitian sebelumnya menggunakan variabel bebas berupa ke bersyukur dan variabel tergantung berupa <i>teacher well-being</i> , sedangkan variabel bebas yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah dukungan sosial, dan variabel tergantung <i>psychological well-being</i> .
Maulina, Merida dan Novianti	2022	Dukungan Sosial dengan <i>Psychological Well-Being</i> pada Ibu yang Mendampingi Anak pada Masa Pembelajaran Daring.	Partisipan yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah ibu yang mendampingi anak pada masa pembelajaran daring, sedangkan partisipan yang digunakan pada penelitian ini adalah guru di sekolah inklusi Kota Yogyakarta.

Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
Khomsiatun, Widiastuti dan Safitri	2021	Hubungan antara Dukungan Sosial dengan <i>Psychological Well-Being</i> pada Remaja Tunarungu di Jakarta.	Partisipan yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah remaja tunarungu, sedangkan partisipan yang digunakan pada penelitian ini adalah guru di sekolah inklusi Kota Yogyakarta.
Rahama	2021	Hubungan antara Dukungan Sosial dengan <i>Psychological Well-Being</i> pada Karyawan.	Penelitian sebelumnya menggunakan skala dukungan sosial yang mengacu pada teori Weis (2010) dan skala <i>psychological well-being</i> berdasarkan teori Ryff dan Singer (2008), sedangkan penelitian ini menggunakan skala dukungan sosial yang mengacu pada teori sarafino dan skala Ryff <i>psychological well-being</i> (1989).
Hardjo dan Novita	2015	Hubungan Dukungan Sosial Dengan <i>Psychological Well-Being</i> Pada Remaja Korban <i>Sexual Abuse</i>	Penelitian sebelumnya menggunakan teori dukungan sosial dari Lin, Woefel, dan Light (1985) dan teori <i>psychological well-being</i> dari Ryff (2007), sedangkan penelitian ini menggunakan teori dukungan sosial dari Sarafino dan Smith (2011) dan teori <i>psychological well-being</i> dari Ryff (1989)

Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya, terlihat adanya perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang mencakup sebagai berikut:

1. Keaslian Topik

Topik yang diambil dalam penelitian ini adalah hubungan antara dukungan sosial terhadap *psychological well being* pada guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang Sekolah Dasar Kota Yogyakarta. Terdapat perbedaan topik pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Issom dan Nadia (2021) dengan judul hubungan ke bersyukur dengan *teacher well-being* pada guru yang mengajar di Sekolah Dasar inklusi. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel bebas berupa ke bersyukur dan variabel tergantung berupa *teacher well-being*, sedangkan variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah dukungan sosial, dan variabel tergantung *psychological well-being*.

2. Keaslian Teori

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardjo dan Novita (2015) dengan judul penelitian hubungan dukungan sosial dengan *psychological well-Being* pada remaja korban *sexual abuse* penelitian sebelumnya menerapkan teori dukungan sosial dari Lin, Woefel, dan Light (1985) dan teori *psychological well-being* dari Ryff (2007), sedangkan penelitian ini menerapkan teori dukungan sosial dari Sarafino dan Smith (2011) dan teori *psychological well-being* dari Ryff (1989).

3. Keaslian Alat Ukur

Penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh Rahama dan Izaati (2021) dengan judul hubungan antara dukungan sosial dengan *psychological well-Being* pada karyawan menggunakan skala dukungan sosial yang mengacu pada teori Weis (2010) dan skala *psychological well-being* berdasarkan teori Ryff dan Singer (2008), sedangkan penelitian ini menggunakan skala dukungan sosial yang merujuk pada teori sarafino dan skala Ryff *psychological well-being* (1989).

4. Keaslian Subjek

Partisipan penelitian ini adalah guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta, sedangkan partisipan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Khomsiatun, Widiastuti dan Safitri (2021) adalah remaja tunarungu di Jakarta. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Maulina, Merida dan Novianti (2022) partisipan penelitian yaitu ibu yang mendampingi anak selama proses pembelajaran daring.

Penelitian ini merupakan penelitian baru, murni, dan asli dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan nantinya.